

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Fenomena politik memang selalu menarik untuk dikaji keberadaannya dan penyebabnya maupun akibat terjadinya fenomena tersebut. Seperti Gerakan Aceh Merdeka di NAD itu sendiri yang merupakan fenomena politik sekaligus sebab dari ikut sertanya Swedia masuk dalam lingkaran permasalahan ini. Suatu keharusan bagi Swedia untuk terlibat dalam problematika ini. Baik karena Swedia sebagai negara tetangga yang dijadikan tempat bermukimnya para tokoh GAM tersebut maupun karena sebagai negara yang merasa bertanggungjawab atas warga negaranya yang telah masuk kedalam masalah ini. Bahkan mereka sebagai aktor utama dalam gerakan Aceh merdeka ini. Dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai sikap pemerintah Swedia terhadap para tokoh GAM yang berada di Swedia. Sikap pemerintah Swedia terhadap para tokoh GAM di Swedia ini merupakan tindakan politik yang menarik dan perlu untuk dikaji akan keberadaan, penyebab maupun akibatnya. Pengakuan Swedia atas penentangan keberadaan GAM sebagai gerakan sparatis maupun organisasi yang terlibat teroris dan makar merupakan hal yang cukup janggal. Karena pada kenyataannya Swedia memperbolehkan aktivitas GAM di Swedia. Swedia juga mengambil kebijakan untuk memilih melindungi para tokoh GAM tersebut daripada menindaknya. Sikap ini cukup membingungkan para aktor politik yang terkait, karena meskipun

mengakui dan menghormati akan kedaulatan NKRI. Dalam penelitian ini nantinya akan terkuak beberapa kemungkinan kepentingan politik pada diri Swedia demi kepentingan nasional mereka. Sehingga untuk kedepannya kita akan sama-sama melihat bagaimana sikap pemerintah Swedia dalam menghadapi para toh GAM tersebut. Yang nantinya akan dikait-kaitkan dengan kepentingan nasional mereka, politik dalam negeri, maupun aspek Internasional yang dijelaskan berdasarkan landasan teori yang penulis ambil. Sehingga kita akan tahu bagaimana sikap Swedia menghadapi para tokoh GAM yang telah melakukan gerakan sparatis di wilayah NKRI yaitu NAD. Dari fenomena itulah penulis melihat dan sangat menarik untuk menganalisa sikap pemerintah Swedia menghadapi para tokoh GAM, faktor-faktor apa yang menyebabkan Swedia memilih sikap politik tersebut. Sehingga pada akhirnya "Sikap Swedia dalam menghadapi para tokoh GAM di Swedia" tersebut merupakan hal yang paling menarik untuk saya jadikan judul dalam penelitian ini.

## **B. Tujuan Penelitian**

Sikap Swedia menghadapi para tokoh GAM Tujuan penelitian ini memberikan gambaran obyektif sehingga dapat dianalisa dan dideskripsikan bukti-bukti otentik tentang sikap Swedia terhadap para tokoh GAM yang berada di Swedia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penelitian ini juga sebagai ajang untuk mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan, dengan mengaplikasikan teori-teori, konsep-konsep ke HI-an guna mendukung

penelitian ini akan dijadikan skripsi, sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana S-1 dari jurusan hubungan Internasional, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Aceh adalah jantung dalam anatomi negara kesatuan Republik Indonesia. Dari daerah inilah denyut dukungan kemerdekaan Indonesia muncul. Titik awal kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah RI bermula ketika diselenggarakannya sidang Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat pada tanggal 8 Agustus 1950 di Jakarta. Sidang memutuskan wilayah Indonesia dibagi menjadi sepuluh propinsi. Dalam hal ini Propinsi Aceh dilebur dan berada di bawah pemerintahan Propinsi Sumatra Utara. Dengan munculnya keputusan tersebut merasakan bahwa perjuangan mereka selama ini untuk mendukung kemerdekaan RI ternyata dibalas dengan air tuba oleh pemerintah RI sendiri. Meskipun Propinsi Aceh dilebur kedalam Propinsi Sumatra Utara, namun keinginan rakyat Aceh agar daerahnya ditangani dengan syariat Islam tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal tersebut mengingat sejarah panjang Aceh yang selalu melahirkan kerajaan-kerajaan Islam. Tatkala Propinsi Aceh dibubarkan dan dilebur kedalam propinsi Sumatra Utara. Rakyat Aceh sangat kecewa dan marah terhadap pemerintah RI pimpinan Sukarno.

Setelah rezim Sukarno jatuh, tokoh-tokoh Aceh berharap bahwa kehidupan ekonomi dan politik didaerahnya bisa terwujud Lebih baik dibandingkan dengan



sentralistik yang diterapkan orde baru pimpinan Soeharto tidak membawa perubahan sesuai harapan. Sukarno dan Soeharto tidak banyak perbedaan, rakyat Aceh banyak yang miskin. Tidak adanya perimbangan keuangan antara daerah dan pusat membuat Aceh semakin terjebak dalam labirin social ekonomimalaupun politik yang pahit.

Hingga pertengahan decade 1970-an, kondisi social ekonomi di Aceh benar-benar timpang. Aceh terus menerus dikuras dan dieksploitasi pemerintah pusat, namun nasib rakyat Aceh saat itu terus menerus mengalami keterpurukan. Padahal, milyaran dolar dikeruk melalui pembangunan pabrik gas alam cair ( LNG ) di Arun, Aceh Utara. Rejeki yang mendasat itu nyata-nyata tidak dirasakan oleh rakyat Aceh.

Keangkuhan yang ditimbulkan dari keberadaan kawasan industri di Aceh Utara telah pula melahirkan dan menyebarkan virus-virus maksiat bagi generasi penerus di Aceh. Lokasi pelacuran gelap, perjudian, diskotik dan club malam bertebaran di Aceh Utara, Aceh Timur dan Banda Aceh. Bagi masyarakat modern ini adalah hal biasa sebagai dampak dari perputaran roda industri tapi bagi masyarakat Aceh ini tidak Lebih sebagai penghancuran syariat Islam.

Dalam keadaan seperti ini gagasan mengenai Aceh merdeka muncul dimotori oleh Hasan Tiro, Menurut pemikirannya, apa yang sudah dijalankan Indonesia semenjak merdeka ialah suatu tiruan murah dari bentuk susunan demokrasi. Selama ini demokrasi di Indonesia adalah suatu demokrasi yang primitif, demokrasi adu angka yang hasilnya bukanlah suatu pemerintahan dari

segolongan rakyat, untuk segolongan rakyat dan oleh segolongan rakyat atas golongan rakyat yang lain. Tegasnya pemerintahan oleh satu suku bangsa atas seluruh suku-suku bangsa Indonesia yang lainnya. Keadilan ini jauh dari perikeadilan yang seharusnya menjadi tujuan tiap-tiap negara.<sup>1</sup>

Gerakan Aceh Merdeka memproklamerkan dirinya pada tanggal 4 Desember 1976 digunung Cokan Kabupaten Pidie untuk menentang pemerintah pusat. Gerakan Aceh Merdeka atau Aceh Sumatra National liberation Front ( ANSLF ), diproklamasikan oleh Muhammad Hasan Tiro yang tercatat sebagai wali negara merangkap menteri pertahanan dan menteri luar negeri dan menteri pertahanan gerakan tersebut. Jabatan Mendagri dipegang oleh Muchtar Hasbi. Sementara wakil menlu dijabat oleh Tengku Ilyas Lebee, sedangkan dua kabinet Hasan Tiro yaitu Dr Zaini Abdullah menjabat sebagai menteri kesehatan dan Tengku Usman Lampoh Awe sebagai menteri keuangan.<sup>2</sup> Saat memproklamerkan wilayah Aceh menjadi sebuah negara merdeka, Hasan Tiro mengklaim wilayah paling utara pulau Sumatra yang meliputi Aceh, Sumatra Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Palembang, Lampung dan Bangka Belitung serta 100 pulau sekitarnya yang menjadi daerah kekuasaannya. Naskah proklamasi ditulis dalam bahasa Aceh dan bahasa Inggris yang isinya sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi untuk Indonesia*, Aceh 1958, hal 54

"Kami bangsa Aceh, Sumatra melaksanakan hak kami menentukan nasib diri sendiri, dan melaksanakan tugas kami untuk melindungi hak suci kami atas tanah pusaka peninggalan nenek moyang, dengan ini menyatakan diri kami dan negeri kami bebas dan merdeka dari penguasaan dan penjajahan regime asing Jawa di Jakarta".<sup>3</sup>

Pemerintah pusat mengambil tindakan tegas, GAM yang waktu itu dikenal dengan AM ( Aceh Merdeka ) ditumpas. Hasan Tiro sendiri lari keluar negeri dan mendirikan pemerintah di pengasingan. Konflik Aceh benar-benar mencuat kepermukaan secara terbuka pada tahun 1989. Titik picu ini dimulai dari Aceh Utara.. Waktu itu sedang diadakan program ABRI Masuk Desa di desa Kuta Makmur, tak jauh dari kota industri Lhokseumawe, seorang desertir berpangkat kopral yang mengaku bernama Robert bersama pengikutnya melumpuhkan ABRI yang sedang melakukan AMD. Nama Robert bukanlah sebutan yang lazim bagi masyarakat Aceh yang kental dengan nuansa Arabisme dan mayoritas beragama islam. Meskipun demikian, Robert terus melakukan malang - melintang melakukan teror dimana-mana, sebelum akhirnya melarikan diri ke Malaysia. Melihat hal itu, Gubernur Aceh waktu itu , Ibrahim Hasan, merasa terganggu oleh ulah GAM tersebut dan melaporkan kepada presiden Soeharto. Saat itu juga presiden Soeharto memerintahkan Panglima ABRI Jendral Tri Soetrisno agar mengendalikan situasi Aceh.

---

<sup>3</sup> <http://www.asnlf.cjb.net/>

Output dari laporan tersebut dikirimlah satuan-satuan militer ke Aceh dalam apa yang mereka sebut sebagai Operasi Jaring Merah. Robert lah yang telah melahirkan DOM di Aceh, di daerah yang kaya akan gas alam ini. Padahal Aceh Utara waktu itu sedang melaju sebagai kawasan industri dan diperebutkan sebagai kelompok kepentingan, sedang rakyat Aceh sendiri mempertanyakan pembagian kue nasional yang tidak adil. Dari kenyataan ini banyak pihak yang mensinyalir, Robert adalah bagian dari permainan kepentingan di Aceh. Sebuah kepentingan untuk melegitimasi pembantaian terhadap rakyat dan tokoh-tokoh setempat yang mencoba bersikap kritis terhadap pola penanganan maupun pembangunan Aceh yang sangat menimbulkan kesenjangan sosial.

Penumpasan dilakukan terutama berkaitan dengan keharusan adanya keamanan di Aceh pada umumnya dan di daerah-daerah industri untuk mengeksplorasikan kekayaan alam yang telah ditemukan serta menjaga agar investasi asing masuk ke Aceh. Sejak itulah DOM diberlakukan selama lebih dari sebelas tahun (1989-1998).

Akibat operasi militer yang digelar aparat keamanan, GAM dengan cepat terciptam oleh aparat keamanan. Sejumlah menteri kabinet Hasan Tiro serta para pengikutnya menyingkir ke hutan-hutan dan pedalaman yang akhirnya tertangkap atau menyerahkan diri. Setelah bergerilya selama berbulan-bulan, Hasan Tiro melarikan diri ke Swedia pada tanggal 28 Maret 1979, yang kemudian negara tersebut menjadi markas besar Gerakan Aceh Merdeka. Waktu itu GAM sedang berhadapan dengan aparat keamanan RI, Dalam waktu tiga tahun Hasan Tiro

termasuk senjata dari Darul Islam telah ditolak oleh Hasan Tiro cs. Hasan Tiro telah bersumpah dan siap mati di bumi Aceh, namun karena keadaan berkata lain Hasan Tiro malah membuat paspor Aceh untuk Dr Husaini supaya meninggalkan Aceh pergi ke luar negeri. Sedangkan Hasan Tiro sendiri pergi ke Singapura diantar oleh Teuku Daud Husein, Saiman, Yusuf Kumis, dan Geusjik Syammaun<sup>4</sup>. Alasan dia adalah untuk menjemput senjata dan mengadakan hubungan luar negeri, untuk mencari dukungan, dalam tempo tiga bulan ia akan kembali dan akan berjuang dan akan kembali. Tetapi setelah 20 tahun lebih lamanya Hasan Tiro belum juga kunjung ke Aceh.

GAM pada akhirnya mampu diredam oleh pemerintah pusat pada awal tahun 1983. Hasan Tiro sendiri bersama beberapa pengikutnya yang berada di luar negeri bukan berarti menghentikan pergerakannya, tetapi mereka menyusun kekuatan baru untuk melawan pemerintahan RI. GAM yang merupakan gerakan separatis Aceh mencari dukungan dari pihak luar negeri seperti Amerika Serikat, Swedia, Singapura melalui provokasinya dalam mencari simpati negara-negara barat, minimal melemahkan upaya yang dilakukan Indonesia. Dari Swedia yang merupakan markas besar GAM, mereka melakukan kampanye yang secara tidak langsung mendapat dukungan dari Swedia, Singapura, Kualalumpur dan Libia<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Hasan Tiro *Pergolakan Aceh*, hal 106

<sup>5</sup> Hasballah M. Saad "Dialog Damai Otonomi Khusus Bagi Aceh" dalam Tempo, Edisi 13-19 Mei 2002.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Dari apa yang terjadi, penulis tertarik mengajukan pertanyaan tentang “ Mengapa Pemerintah Swedia melindungi para tokoh GAM yang berada di Swedia ? “

#### **E. Landasan Berfikir**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka langkah berikutnya akan dikemukakan anggapan dasar , yaitu berupa serangkaian teori dan konsep-konsep yang relevan. Anggapan dasar tersebut diarahakan pada upaya pembentukan hipotesa yang merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan.<sup>6</sup> Bagi keperluan studi ini, upaya pembentukan hipotesa akan diawali dengan pendekatan sebagai dasar argumentasi dan kerangka teoritis, kemudian disusun alur berfikir logis sebagai kerangka konseptual.<sup>7</sup>

#### **Konsep Kepentingan Nasional**

Dalam studi hubungan Internasional, kita dapati bahwa kajian kebijakan luar negeri sangat luas dan kompleks. Kebijakan luar negeri dalam pengertian luas terdiri atas pola-pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya, dalam hubungannya dengan negara lain atau dilakukan terhadap lingkungan eksternalnya.

---

Sebelum menguraikan teori yang dipakai didalam menganalisa permasalahan ini, lebih dulu akan disampaikan apa yang disebut politik dalam negeri, seperti yang diungkapkan oleh K.J Holsti, output dari kebijakan dalam negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan yaitu dalam kebijakan, sikap, atau tindakan negara lain.<sup>8</sup> Pembahasan mengenai politik dalam negeri senantiasa dimulai dari kepentingan nasional negara yang melaksanakannya. Dengan demikian pemaparan tentang politik dalam negeri juga harus didasarkan pada konsep kepentingan nasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kebijakan dalam luar negeri dirumuskan sebagai berikut :*Foreign policy is strategy or planed course of action developed by decision makers of a state or International entities aimed at achieving spesific goals defined interm of national interest.*<sup>9</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa politik luar dalam suatu negara adalah strategi atau serangkaian kegiatan yang terencana dan dikembangkan oleh para pembuat keputusan dari suatu negara terhadap negara lain atau terhadap entitas internasional yang ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang terdefinisi intern bagi kepentingan internasionalnya.

---

<sup>8</sup> K.J Holsti (Terj. M. Tahrir Azhari) Editor : Herman Sinaga, *Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis*, Jilid I, Erlangga, Jakarta 1988, hal. 165

Berdasarkan landasan berfikir yang dikemukakan Jack C. Plano dan Roy Olton, national interest atau kepentingan nasional yang dimiliki oleh Swedia antara lain adalah untuk melindungi seluruh warga negaranya baik dari faktor dalam negeri maupun dari lingkungan internasional, yaitu perlindungan dari negara lain yaitu Indonesia dalam kasus ini misalnya. Semua pernyataan Swedia terhadap kepentingan nasionalnya tersebut telah terdapat dalam asas yang dimiliki oleh Swedia. Suatu asas yang merupakan pedoman yang berlaku di Swedia yaitu asas *protection trahit subjectionemet subjection protectionem*. Adanya asas yang berlaku di Swedia tersebut dikemukakan oleh Duta Besar Swedia untuk Indonesia Harald Sanberg dan Juru bicara Kementerian Luar Negeri Swedia Lars-Olof Landberg<sup>10</sup>

Meskipun tujuan politik dalam negeri suatu negara yang satu dengan negara yang lain berbeda, tetapi pada umumnya berkisar pada beberapa hal yang disebut Jack C. Plano dan Roy Olton, yaitu : Self-preservation, interdependence, teritorial integrity, military security, and economic well-being.<sup>11</sup>

Bagi para aktor pengambil keputusan dan kebijaksanaan politik dalam negeri suatu bangsa akan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap formulasi kebijaksanaan politik dalam negerinya. Kepentingan suatu negara menjadi dasar untuk mengukur keberhasilan politik dalam negerinya.

---

<sup>10</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com) "Persoalan Hukum Hasan Tiro dkk"

<sup>11</sup> Ibid, hal. 128

Politik dalam negeri meliputi proses yang dinamis dalam menetapkan intepetasi yang relatif mantap terhadap kepentingan nasionalnya dalam menghadapi faktor-faktor situasional yang sering berubah di lingkungan internasional. Proses ini untuk mengembangkan tindakan-tindakan yang diikuti oleh usaha-usaha untuk mencapai pelaksanaan garis-garis kebijakan dalam negerinya.

Tujuan utama politik dalam negeri adalah untuk mewujudkan tujuan, cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara. Politik dalam negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut.

Kajian mengenai proses pembuatan keputusan dalam negeri (*the decision making process*) menjelaskan bahwa politik dalam negeri dipandang sebagai hasil berbagai alternatif yang ada dengan keuntungan sebesar-besarnya atau keuntungan sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.<sup>12</sup>

Sikap pemerintah Swedia dalam mengambil sikap politik Aceh ini apabila dilihat dari konsep kepentingan nasional, proses kebijakan kebijakan pemerintah Swedia dapat dipahami sebagai berikut : Konsep kepentingan nasional merupakan

---

<sup>12</sup> ... ..

mengakui dan menghormati akan kedaulatan NKRI. Dalam penelitian ini nantinya akan terkuak beberapa kemungkinan kepentingan politik pada diri Swedia demi kepentingan nasional mereka. Sehingga untuk kedepannya kita akan sama-sama melihat bagaimana sikap pemerintah Swedia dalam menghadapi para toh GAM tersebut. Yang nantinya akan dikait-kaitkan dengan kepentingan nasional mereka, politik dalam negeri, maupun aspek Internasional yang dijelaskan berdasarkan landasan teori yang penulis ambil. Sehingga kita akan tahu bagaimana sikap Swedia menghadapi para tokoh GAM yang telah melakukan gerakan sparatis di wilayah NKRI yaitu NAD. Dari fenomena itulah penulis melihat dan sangat menarik untuk menganalisa sikap pemerintah Swedia menghadapi para tokoh GAM, faktor-faktor apa yang menyebabkan Swedia memilih sikap politik tersebut. Sehingga pada akhirnya "Sikap Swedia dalam menghadapi para tokoh GAM di Swedia" tersebut merupakan hal yang paling menarik untuk saya jadikan judul dalam penelitian ini.

## **B. Tujuan Penelitian**

Sikap Swedia menghadapi para tokoh GAM Tujuan penelitian ini memberikan gambaran obyektif sehingga dapat dianalisa dan dideskripskan bukti-bukti otentik tentang sikap Swedia terhadap para tokoh GAM yang berada di Swedia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penelitian ini juga sebagai ajang untuk mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan, dengan mengaplikasikan teori-teori, konsep-konsep ke HI-an guna mendukung

1. Tujuan penelitian ini tentu saja tidak dapat diungkiri adalah bahwa

konsep yang paling populer digunakan guna menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara dalam analisa hubungan internasional dan sebagai pengukur keberhasilan suatu kebijakan luar negeri.<sup>13</sup>

Sikap pemerintah Swedia dalam mengambil sikap terhadap para tokoh GAM di Swedia ini apabila dilihat dari konsep kepentingan nasional, proses kebijakan pemerintah Swedia dapat difahami sebagai berikut : Sikap pemerintah Swedia yang salah satunya terealisasikan dalam wujud perlindungan atas warga negaranya dan tidak adanya kesanggupan Swedia untuk menindak dan mengadili warganegara tersebut disebabkan karena adanya alasan politik faktor dalam negeri Swedia. Meskipun Swedia mengakui bahwa GAM sebagai gerakan terlarang namun demi kepentingan nasionalnya Swedia memilih mengambil kebijakan untuk melindungi Hasan Tiro dkk sebagai warga negaranya. Swedia juga masih tetap menjunjung tinggi nilai-nilai politik Luar Negerinya yang selama ini terkenal netral. Sehingga Swedia tetap berusaha mempertahankan kebijakannya yang netral dengan tidak mencampuri atau intervensi terhadap negara lain yaitu Indonesia .

Berdasarkan konsep kepentingan nasional, suatu negara akan melakukan tindakan politik untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya baik melalui politik luar negeri maupun politik dalam negerinya. Dalam konsep kepentingan nasional ini, demi mewujudkan kepentingan nasionalnya, Swedia berupaya melindungi warga negaranya dengan dalih kewarganegaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia

#### **F. Hipotesa**

Pemerintah Swedia melihat para tokoh GAM yang berada di Swedia dengan dalih:

1. Untuk Mewujudkan kepentingan nasional, yaitu perlindungan atas warga negaranya
2. Karena Swedia sangat menghormati HAM.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian dalam penelitian ini akan berkisar pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, didalamnya membahas tentang kondisi perpolitikan baik dalam negeri maupun luar negeri Swedia terkait dengan konflik Aceh, pelarian tokoh-tokoh GAM ke Swedia, respon dari Swedia atas pelarian tersebut, hingga sikap Swedia terhadap para tokoh GAM di Swedia beserta dalih dari sikap politik tersebut.

## **H. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan studi pustaka dari literature-literatur, majalah, surat kabar, situs-situs internet yang dapat memberikan informasi yang kemudian data tersebut diolah dan dianalisa dengan teknik analisa data skunder guna membahas permasalahan yang ada.

## **I. Sistematika penulisan**

BAB I, merupakan pendahuluan. Penulis mengemukakan tentang alasan kerangka dasar teori, hipotesa, metode pengumpulan data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Penulis membahas mengenai konflik Aceh

BAB III, penulis membahas mengenai deskripsi Swedia yang didalamnya membahas tentang system politik baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri swedia dan perekonomian Swedia pelaria para tokoh GAM ke Swedia, Perlindungan hukum Swedia, juga membahas tentang prisip pengakuan kedaulatan Swedia.

BAB IV, Pada bab ini penulis akan membahas mengenai dalih Swedia trhadap Indonesia dalam sikapnya yang melindungi para tokoh GAM di Swedia

BAB V, Merupakan kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan paparan dan analisa bab-bab sebelumnya.